
Pendampingan Mahasiswa KPM untuk Sinergitas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Desa Sahang: untuk Memperkuat Peran Keumatan dan Kebangsaan

Muhammad Ibnu Soleh¹, Tamrin Fathoni²

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

Abstract

This article aims to describe the synergy between Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) in Sahang Village, Ngebel District, Ponorogo Regency, as an effort to strengthen religious service and nationalism. The Audience (A) of this study is the community of Sahang Village, particularly members of Muhammadiyah and NU. The Behavior (B) expected is the establishment of collaboration in education, social, economic, and youth activities. The Condition (C) of this research is implemented through the Community Service Program (KPM) using a descriptive qualitative approach with observation, interviews, and documentation methods. The Degree (D) shows that the synergy between Muhammadiyah and NU can strengthen *ukhuwah wathaniyah* (national unity), reduce potential social segregation, and increase youth participation in religious and national activities. Thus, the collaboration of these two organizations becomes an important strategy in building social harmony and reinforcing national values at the village level.

Keywords

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Synergy, Religious Service, Nationalism

Corresponding Author

Muhammad Ibnu Soleh

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, mibnu5290@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Desa Sahang merupakan komunitas pedesaan dengan tradisi keagamaan yang kuat, di mana lembaga-lembaga keagamaan seperti Madrasah Diniyah, TPQ, pengajian rutin, serta organisasi massa Islam hadir aktif. Kehadiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat desa tidak hanya berwujud kegiatan ibadah dan pendidikan, tetapi juga layanan sosial-ekonomi (BMT/LAZIS, UMKM), dan kegiatan kemasyarakatan (gotong royong, bakti sosial). Namun di banyak lokasi, perbedaan kultur organisasi, metode dakwah, dan prioritas program dapat menyebabkan fragmentasi kegiatan—menyebabkan duplikasi usaha, kurangnya koordinasi, dan potensi persaingan sumber daya (PBNU, 2021).



Laporan ini memandang sinergitas sebagai strategi untuk mengoptimalkan peran keummatan (pelayanan kepada umat) sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan (Pancasila, ukhuwah wathaniyah). Di konteks KPM, mahasiswa bertindak sebagai fasilitator, pemantik dialog, dan pendamping teknis dalam perencanaan program bersama. Sinergi antar organisasi merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berdaya (Hefner, 2000).

Teori kolaborasi antar lembaga menekankan pentingnya pembagian peran, koordinasi, serta kepemimpinan bersama (*collective impact*) agar tujuan bersama dapat tercapai. Sinergi hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak memiliki visi yang sama, didukung oleh platform komunikasi yang terbuka, serta dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, modal sosial (*social capital*) menjadi fondasi penting karena jalinan relasi antar tokoh organisasi masyarakat dan warga dapat membangun kepercayaan, memperkuat jaringan, dan mempermudah kolaborasi program yang berorientasi pada kepentingan bersama (Noer, 1980).

Upaya memperkuat sinergi ini juga perlu dilandasi oleh penguatan moderasi beragama dan pendidikan kebangsaan. Program pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, pemahaman mendalam tentang Pancasila, serta literasi digital yang memadai berperan penting dalam mencegah disinformasi dan sikap eksklusif di tengah masyarakat (Ridwan, 2018). Oleh karena itu, inisiatif memperkuat sinergitas antara Muhammadiyah dan NU di Desa Sahang diarahkan untuk memastikan peran keummatan dan kebangsaan dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, pembentukan forum koordinasi lintas-organisasi masyarakat di tingkat desa menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkuat komunikasi dan perencanaan bersama. Peningkatan kapasitas madrasah diniyah melalui metode pembelajaran yang ramah anak menjadi salah satu prioritas, diikuti dengan penguatan kemampuan UMKM lokal dalam pencatatan keuangan dan pemasaran agar ekonomi desa semakin berkembang (Ihwanudin, 2017). Selain itu, peningkatan literasi moderasi beragama dan Pancasila pada kalangan pemuda menjadi bagian penting untuk membangun generasi yang toleran dan berwawasan kebangsaan. Seluruh upaya ini kemudian dirangkum dalam penyusunan rencana kegiatan kolaboratif selama 12 bulan ke depan serta pembuatan nota kesepahaman (MoU) sederhana yang mengikat komitmen seluruh pihak terkait (Kementerian Agama RI, 2019).

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif

dengan nuansa aksi-partisipatif (*action research/service-learning*) yang berorientasi pada kolaborasi antarorganisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat desa. Pendekatan ini dipilih agar peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain observasi partisipatif, wawancara semi-struktural, focus group discussion (FGD), survei menggunakan kuesioner (baseline–endline), serta dokumentasi kegiatan. Observasi dilaksanakan secara terstruktur di lapangan untuk merekam interaksi, kondisi fasilitas, serta dinamika sosial masyarakat. Wawancara dilakukan dengan pedoman berisi 5–10 pertanyaan terbuka yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam sesuai situasi. FGD difungsikan untuk mengungkap persepsi kolektif dan menyusun kesepakatan lintas-ormas. Sementara itu, survei singkat digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap terkait moderasi beragama serta literasi Pancasila, menggunakan skala Likert 1–4.

Dokumentasi penelitian mencakup pencatatan logbook kegiatan, pengambilan foto, serta pengarsipan dokumen resmi seperti MoU. Narasumber penelitian dipilih secara purposive agar mewakili seluruh unsur penting dalam program, meliputi Kepala Desa, Ketua PCM/PRM Muhammadiyah, Ketua MWC/PR NU, pengelola Madin, guru ngaji, 10 pelaku UMKM, 30 pemuda (anggota IPM, IPNU, IPPNU), serta perwakilan Karang Taruna (Ihwanudin, 2017). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, kuesioner pengetahuan dan sikap moderasi beragama, serta format logbook untuk mendokumentasikan kegiatan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, pengodean tematik, triangulasi antar-sumber, hingga penyusunan narasi hasil. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi dibandingkan untuk memastikan validitas melalui triangulasi sumber. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan guna menemukan pola kolaborasi, dampak kegiatan, serta perubahan pengetahuan maupun sikap masyarakat. Indikator kinerja ditetapkan sejak awal untuk memantau keberhasilan program, mencakup jumlah pertemuan kolaboratif yang terlaksana, jumlah peserta pelatihan, jumlah UMKM yang menerima pendampingan, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas-ormas.

Kegiatan penelitian berlangsung selama tujuh minggu dengan tahapan bertahap. Pada minggu pertama dilakukan pemetaan aset desa serta sosialisasi program, diikuti minggu kedua dengan dialog lintas-ormas dan penyusunan MoU. Minggu ketiga diisi dengan pelatihan moderasi

beragama dan literasi Pancasila, sementara minggu keempat difokuskan pada penguatan Madin melalui tiga sesi pelatihan guru. Selanjutnya, minggu kelima ditujukan untuk pelatihan UMKM dan pencatatan keuangan sederhana, lalu minggu keenam dilaksanakan aksi lingkungan dan peluncuran bank sampah masjid. Program ditutup pada minggu ketujuh dengan penyusunan kalender kegiatan bersama serta penetapan sekretariat kolaborasi.

Metode ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data penelitian yang valid, tetapi juga meninggalkan dampak nyata berupa terbentuknya forum sinergi lintas-ormas, revisi kurikulum Madin menjadi RPP tematik, peningkatan kapasitas UMKM, pelaksanaan aksi lingkungan berkelanjutan, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap moderasi beragama dan nilai-nilai Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergi antara Muhammadiyah dan NU di Desa Sahang berhasil karena adanya fasilitasi netral yang dijalankan oleh mahasiswa dan KPM sebagai mediator dialog antarorganisasi. Pendekatan berbasis aset (*asset-based community development*) membantu memunculkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga mereka merasa dihargai dan berkontribusi. Selain itu, keterlibatan pemuda menjadi faktor kunci karena mereka berperan sebagai agen perubahan yang membawa energi baru, inovasi, dan semangat kolaboratif. Sinergi ini menghasilkan dampak nyata, seperti koordinasi pendidikan keagamaan yang lebih baik, pendampingan UMKM secara terstruktur, serta kegiatan sosial yang lebih inklusif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kendala struktural yang ada, seperti keterbatasan waktu pengurus, masa tugas relawan yang singkat, dan keterbatasan pembiayaan program, dapat diatasi dengan mekanisme mitigasi yang tepat. Pembagian tugas yang disesuaikan dengan kompetensi anggota membuat pelaksanaan program lebih efisien. Penggunaan kalender terpadu juga membantu menghindari tumpang tindih kegiatan sehingga seluruh agenda dapat berjalan dengan lancar. Upaya mencari sumber dana alternatif, seperti dukungan CSR lokal, iuran gotong royong, dan bantuan dari lembaga zakat (LAZIS), menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan pendanaan (Bahtiar Effendy, 2011).

Rekomendasi Operasional dan Kebijakan

Rekomendasi operasional dan kebijakan ini disusun untuk memastikan keberlanjutan program sinergi antar organisasi dan optimalisasi peran pemuda serta masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan lapangan, disusun rekomendasi operasional dan kebijakan

yang terbagi dalam tiga tahapan waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Jangka Pendek (0–6 Bulan)

Pada tahap ini, fokus diarahkan pada pembentukan dasar koordinasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah pertama adalah pembukaan rekening operasional untuk sekretariat bersama sebagai sarana pendanaan kegiatan rutin dengan modal awal yang sederhana. Selanjutnya, dijadwalkan pertemuan koordinasi secara rutin minimal satu kali setiap bulan guna menjaga komunikasi, sinkronisasi kegiatan, serta penyelesaian isu lapangan secara cepat. Untuk mendukung manajemen informasi, dilakukan pelatihan digital dasar bagi sepuluh admin pemuda, sehingga mereka mampu mengelola administrasi dan media komunikasi secara lebih efektif.

Jangka Menengah (6–18 Bulan)

Tahap jangka menengah difokuskan pada penguatan program dan pemberdayaan masyarakat. Disusun program inkubasi UMKM yang meliputi kegiatan mentoring, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan melalui BMT, serta pengembangan etalase digital sebagai media pemasaran produk lokal. Di bidang pendidikan keagamaan, dikembangkan modul Madin Ramah Anak yang distandarkan bersama oleh para pemangku kepentingan, sehingga proses pembelajaran dapat lebih inklusif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Jangka Panjang (>18 Bulan)

Pada tahap jangka panjang, diarahkan upaya untuk memastikan keberlanjutan program melalui dukungan kelembagaan dan pembiayaan. Proposal diajukan kepada pemerintah kabupaten maupun pihak CSR sebagai sumber pendanaan program berkelanjutan. Selain itu, diusulkan agar seluruh program sinergi yang telah berjalan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sehingga mendapatkan legitimasi formal dan dukungan anggaran dari pemerintah desa.

Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa sinergi antarormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU mampu menciptakan dampak sosial yang signifikan ketika didukung oleh fasilitasi yang netral, strategi berbasis aset, serta keterlibatan pemuda. Keberlanjutan sinergi ini sangat bergantung pada komitmen institusional, keberadaan mekanisme pendanaan yang stabil, dan penguatan kapasitas administrasi maupun literasi digital pengelola program. Hal ini sejalan dengan pandangan Bahtiar Effendy (2011) dan Noer (1980) yang menekankan pentingnya kerja sama lintas organisasi demi penguatan masyarakat sipil dan pembangunan desa yang berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan Yasinan Amaliah NU di Desa Sahang



Gambar 2. Kegiatan Amaliah NU dan Muhammadiyah

Problematika yang mempengaruhi kegiatan amaliah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di masyarakat, khususnya di Desa Sahang yaitu muncul dari perbedaan dalam praktik ibadah, tradisi, dan pendekatan dakwah. NU cenderung mempertahankan tradisi keagamaan lokal seperti tahlilan, qunut subuh, istighosah, ziarah kubur, hingga peringatan hari besar Islam, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan purifikasi ajaran dengan kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak mengamalkan sebagian tradisi tersebut. Perbedaan ini sering memunculkan perdebatan bahkan jarak sosial antarjamaah. NU kuat dalam melestarikan budaya Islam Nusantara, sementara Muhammadiyah mendorong modernisasi melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Martini dkk., 2022).

Dalam metode dakwah, NU mengedepankan pendekatan kultural lewat pengajian kitab kuning dan pesantren, sedangkan Muhammadiyah mengedepankan pendekatan modern dengan ceramah ilmiah dan media digital (Bruinessen, 1994). Kondisi ini terkadang menimbulkan dualisme kelembagaan, seperti adanya dua masjid atau dua madrasah dalam satu desa, yang berpotensi memperkuat dakwah Islam sekaligus memicu fragmentasi sosial. Problematika juga diperparah oleh stigma dan kurangnya forum dialog, di mana sebagian warga NU menilai Muhammadiyah terlalu kaku, sementara warga Muhammadiyah menganggap amaliah NU tidak sesuai dalil. Perbedaan ini sejatinya bukan sekadar persoalan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan aspek

kultural, ideologis, dan sosial (Abdul Munir Mulkhan, 2010). Jika dikelola dengan baik, keragaman tersebut justru dapat menjadi kekayaan Islam Nusantara, di mana NU menjaga tradisi dan Muhammadiyah mendorong modernisasi, sehingga keduanya dapat saling melengkapi (Hefner, 2000).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Madrasah Diniyah Nurul Hikmah di Desa Sahang berada pada titik krusial antara legitimasi formal dan realitas operasional, di mana pencapaian status terdaftar dari Kementerian Agama baru merupakan langkah awal yang belum diiringi kemajuan internal yang signifikan. Madrasah ini masih menghadapi tantangan kompleks berupa kurikulum yang masih elementer, keterbatasan tenaga pengajar yang kompeten, minimnya sarana prasarana, dan kurangnya dukungan eksternal yang terstruktur, sehingga memunculkan kesenjangan antara potensi dan kinerja aktual yang mengakibatkan stagnasi meski telah diakui secara legal. Sebagai respons terhadap problematika tersebut, dirumuskan model optimalisasi yang holistik dengan empat pilar utama, yaitu pengayaan kurikulum melalui materi kitab kuning, program tahfidz Al-Qur'an, dan bahasa Arab; pengembangan ekstrakurikuler seperti seni hadrah dan kompetisi keagamaan; pembangunan kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan organisasi masyarakat; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas secara bertahap. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan siklus pengembangan berkelanjutan yang mentransformasikan madrasah menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul, dinamis, dan berdaya saing, sekaligus berfungsi sebagai benteng moral-spiritual generasi muda Desa Sahang serta menjadi model pengembangan yang dapat direplikasi oleh madrasah rintisan lain di seluruh Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan keagamaan nonformal secara nasional.

REFERENSI

- Abdul Munir Mulkhan. (2010). *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Bentang.
- Bahtiar Effendy. (2011). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Bruinessen, M. van. (1994). *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. LKiS.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press. University Press.

- Ihwanudin, N. (2017). HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENTAS EKONOMI GLOBAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n1.87>
- Kementerian Agama RI. (2019). Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Martini, T., Siregar, R. A. S., & Pasaribu, N. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh. *Hikmah*, 19(1), 64–76. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i1.157>
- Noer, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES. LP3ES.
- PBNU. (2021). *Khittah Nahdlatul Ulama dan Pedoman Organisasi*. Jakarta: PBNU. PBNU.
- Ridwan, M. (2018). Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5079>